



Pengembangan Layanan Digital dalam Membangun Kepercayaan Publik melalui Digital Desa yang Informatif

<u>INFO PENULIS</u>	<u>INFO ARTIKEL</u>
Muhamad Faizal Universitas Sultan Maulana hasanuddin Banten faizalmuhamad177@gmail.com	ISSN: 2808-1307 Vol. 6, No. 2, Agustus 2026 https://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajsh
Syaif Adiansyah Universitas Sultan Maulana hasanuddin Banten saif.adiansyh04@gmail.com	
Mohamad Gea Subagja Universitas Sultan Maulana hasanuddin Banten geasubagja3@gmail.com	
Keyla Atala Avanza Satiri Universitas Sultan Maulana hasanuddin Banten keylaatala48@gmail.com	
Syavira El Hadi Universitas Sultan Maulana hasanuddin Banten syaviraelhadi1@gmail.com	
Mohamad Imam Kamaludin Universitas Sultan Maulana hasanuddin Banten mikamalaudin10@gmail.com	

© 2026 Arden Jaya Publisher All rights reserved

Saran Penulisan Referensi

Faizal, M., Adiansyah, S., Subagja, M. G., Satiri, K. A. A., Hadi, S. E., & Kamaludin, M. I. (2026). Pengembangan Layanan Digital dalam Membangun Kepercayaan Publik melalui Digital Desa yang Informatif. *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora*, 6 (2),2461-2467.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi layanan digital di Desa Sindangheula, Kecamatan Pabuaran, Kabupaten Serang, dalam membangun kepercayaan publik melalui pengelolaan informasi berbasis digital sebagai bagian dari program Desa Digital yang digagas Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. Transformasi digital di wilayah pedesaan menjadi salah satu agenda pembangunan strategis nasional yang bertujuan memperluas akses layanan publik sekaligus mendorong partisipasi masyarakat dalam tata kelola pemerintahan desa. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara semi terstruktur dan observasi lapangan. Penentuan informan dilakukan melalui teknik purposive sampling yang mencakup Kepala Desa Sindangheula, administrator website desa, serta masyarakat sebagai pengguna aktif layanan digital. Analisis data dilakukan secara induktif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, dengan triangulasi sumber untuk menjamin keabsahan data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Desa Digital di Desa Sindangheula telah memberikan kemudahan akses layanan administrasi kependudukan melalui aplikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) serta mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pemanfaatan media sosial dan marketplace digital. Namun, kepercayaan publik terhadap layanan digital masih terhambat oleh tiga faktor utama, yaitu kesenjangan literasi digital terutama pada kelompok usia lanjut, keterlambatan pembaruan data administrasi, serta keterbatasan infrastruktur jaringan internet. Penelitian ini menyimpulkan bahwa keberhasilan Desa Digital tidak semata ditentukan oleh ketersediaan teknologi, melainkan juga oleh kualitas layanan, aksesibilitas informasi, dan peningkatan literasi digital yang berkelanjutan sebagai fondasi utama kepercayaan publik.

Kata kunci: Desa Digital, Layanan Digital, Kepercayaan Publik, Literasi Digital, Administrasi Kependudukan

Abstract

This study aims to analyze the implementation of digital services in Sindangheula Village, Pabuaran District, Serang Regency, in building public trust through digital-based information management as part of the Digital Village program initiated by the Ministry of Communication and Information Technology of the Republic of Indonesia. Digital transformation in rural areas has become one of the nation's key strategic development agendas, aimed at expanding public service access while promoting community participation in village governance. This research employs a qualitative descriptive approach with data collection techniques comprising semi-structured interviews and field observation. Informants were selected through purposive sampling, consisting of the Village Head of Sindangheula, the village website administrator, and community members as active users of digital services. Data analysis was conducted inductively through stages of data reduction, data presentation, and conclusion drawing, with source triangulation applied to ensure data validity. The results indicate that Digital Village implementation in Sindangheula Village has facilitated easier access to population administration services through the Digital Identity Card (IKD) application, while also promoting community economic empowerment through social media and digital marketplace platforms. However, public trust in digital services remains constrained by three primary factors: the digital literacy gap particularly among elderly residents, delays in administrative data updates, and limited internet infrastructure. This study concludes that the success of a Digital Village is not solely determined by the availability of technology, but also by service quality, information accessibility, and sustained digital literacy improvement as the primary foundation of public trust.

Keywords: Digital Village, Digital Services, Public Trust, Digital Literacy, Population Administration

A. Pendahuluan

Di era yang serba digital saat ini, kehadirannya perlu diterima dengan sangat progresif dalam mentransformasikannya. Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) memiliki perencanaan jangka panjang dalam mengusahakan terciptanya desa digital sebagai salah satu langkah strategis dalam mewujudkan Indonesia yang lebih maju lagi. Program digitalisasi desa pada dasarnya adalah upaya menciptakan tata kelola serta pelayanan

desa yang diberikan kepada masyarakat dengan berbasis digital dalam bentuk, aplikasi, *website*, ataupun layanan digital lainnya [1]

Beberapa tahun terakhir transformasi digital di wilayah pedesaan menjadi titik fokus pembangunan di Indonesia. Konsep digitalisasi ini dianggap mampu menjembatani kesenjangan layanan publik antara wilayah urban dan rural melalui pemanfaatan teknologi digital. Program ini juga dipandang sebagai upaya memperluas jangkauan ruang partisipasi masyarakat serta mendukung dalam penguatan akuntabilitas pemerintah desa [2]. Seiring berkembangnya teknologi digital yang semakin pesat memaksa desa untuk cepat beradaptasi agar tidak mengalami ketertinggalan. Dalam penciptaannya, desa digital tidak hanya dimaksudkan untuk kemajuan Indonesia ataupun agar tidak mengalami ketertinggalan. Program ini juga dianggap sebagai bentuk persiapan desa di Indonesia dalam menghadapi gempuran perkembangan teknologi yang kian pesat dan sebagai stimulan dalam memperbaiki layanan publik dan ekonomi dengan tujuan memperluas potensi desa, pemasaran serta percepatan akses pelayanan publik [3].

Tidak menutup kemungkinan pada era yang serba digital saat ini mengharuskan semua sektor mengakses media informasi berbasis digital. Bukan tanpa alasan, hal ini dibuktikan banyaknya informasi yang masuk dari berbagai media, salah satunya media digital. Sudah sejak lama, pemerintah maupun organisasi publik dituntut untuk segera menerapkan penyebaran informasi serta pelayanan berbasis digital, begitu juga dengan pemerintah desa di Indonesia yang sesegera mungkin menerapkan konsep dari desa digital [4].

Namun, di Indonesia masih banyak desa-desa yang mengalami kesenjangan digital yang menjadi tantangan dalam mewujudkan transformasi desa digital. Jaringan internet yang tidak stabil, perangkat teknologi yang belum memadai, serta tingkat literasi digital yang rendah di kalangan masyarakat menjadi penghambat untuk berpartisipasi memanfaatkan akses layanan dan informasi secara digital yang sudah disediakan oleh desa [5]. Kesenjangan ini juga mengakibatkan keterbatasan akses informasi, layanan desa, serta menghambat pertumbuhan ekonomi lokal karena kesulitan dalam mengangkat value dan memperluas jaringan bisnis [6]. Sangat disayangkan sekali melihat Indonesia sebagai salah satu negara dengan penggunaan media sosial terbesar tetapi masih ditemukannya kesenjangan akses internet. Hal ini dibuktikan dengan skor indeks literasi digital Indonesia di angka 3,49. Penelitian yang dilakukan oleh Risel, dkk (2021) ditemukan survey Status Literasi Digital Indonesia oleh Katadata dan Kominfo RI menyebutkan bahwa jaringan internet di Indonesia memang relatif tidak stabil [7].

Kesenjangan ini dirasakan juga oleh masyarakat Desa Sindangheula. Desa Sindangheula merupakan salah satu desa yang sudah bertransformasi menjadi desa digital yang diresmikan di Indonesia, namun pada kenyataannya penerapan transformasi ini masih belum merata diterapkan oleh masyarakatnya. Kesenjangan ini mengakibatkan terhalangnya desa-desa dalam mencapai potensi maksimalnya. Maka dari itu diperlukannya sosialisasi lebih lanjut oleh pemerintah desa dalam mengenalkan inovasi digital yang sudah diciptakan oleh pemerintah desa.

B. Metodologi

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, yakni pendekatan yang bertujuan menggambarkan dan menganalisis fenomena sosial secara mendalam berdasarkan perspektif subjek yang diteliti. Pendekatan ini dipilih karena persoalan kepercayaan publik terhadap layanan digital bersifat kontekstual dan tidak dapat diukur secara memadai hanya melalui angka, melainkan memerlukan pemahaman atas makna, pengalaman, dan persepsi para pelaku yang terlibat langsung dalam program Desa Digital.

Penelitian dilaksanakan di Desa Sindangheula, Kecamatan Pabuaran, Kabupaten Serang, Provinsi Banten, salah satu desa yang telah ditetapkan sebagai desa digital dalam program Kementerian Komunikasi dan Informatika. Pemilihan lokasi ini didasarkan atas pertimbangan bahwa Desa Sindangheula telah mengimplementasikan layanan berbasis digital, namun masih menghadapi berbagai tantangan dalam pemerataan pemanfaatannya oleh masyarakat.

Pengumpulan data primer diperoleh melalui dua teknik utama. Pertama, wawancara semi terstruktur (*semi-structured interview*), yaitu wawancara yang menggunakan panduan pertanyaan terbuka sehingga memungkinkan informan mengungkapkan pengalaman dan pandangannya secara lebih bebas dan mendalam. Kedua, observasi lapangan dilakukan untuk mengamati secara langsung kondisi infrastruktur digital, pola penggunaan layanan oleh masyarakat, serta dinamika interaksi antara pemerintah desa dan warganya dalam konteks

digitalisasi. Selain data primer, data sekunder diperoleh dari dokumen resmi desa, literatur ilmiah, dan referensi kebijakan yang relevan.

Penentuan informan dilakukan menggunakan teknik purposive sampling, yaitu pemilihan informan secara disengaja berdasarkan kriteria yang relevan dengan tujuan penelitian. Informan dalam penelitian ini terdiri dari tiga kelompok: (1) Kepala Desa Sindangheula sebagai pengambil kebijakan dan penanggung jawab program desa digital; (2) administrator website desa sebagai pengelola teknis layanan digital; dan (3) masyarakat pengguna layanan digital, dipilih berdasarkan variasi usia dan tingkat keterlibatan dengan layanan yang tersedia.

Untuk menjamin keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber, yaitu dengan membandingkan dan mengonfirmasi data yang diperoleh dari berbagai informan yang berbeda agar hasil penelitian tidak bergantung pada satu sudut pandang saja.

C. Hasil dan Pembahasan

Implementasi Desa Digital dan Tantangan Kesenjangan Digital di Desa Sindangheula

a) Implementasi Program Desa Digital sebagai Inovasi Pelayanan Publik

Program desa digital yang diterapkan di Desa Sindangheula merupakan inovasi yang diinisiasi oleh pemerintah desa sebagai respons terhadap perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat. Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala desa, digitalisasi desa dinilai sebagai langkah yang tepat untuk menyesuaikan pelayanan publik dengan kebutuhan masyarakat yang semakin akrab dengan penggunaan internet dan teknologi digital dalam kehidupan sehari-hari. Menurutnya, hampir seluruh aktivitas masyarakat saat ini telah terhubung dengan teknologi, sehingga pelayanan yang diberikan juga harus mampu beradaptasi dengan perubahan tersebut.

Implementasi program desa digital dilakukan melalui pengembangan sistem pelayanan berbasis aplikasi yang dapat diakses oleh masyarakat menggunakan *handphone*. Melalui sistem tersebut, masyarakat diharapkan mampu mengurus berbagai kebutuhan administrasi secara daring tanpa harus datang langsung ke kantor desa. Digitalisasi pelayanan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah desa untuk meningkatkan efektivitas pelayanan sekaligus mengurangi proses birokrasi yang selama ini dianggap memakan waktu.

Selain pelayanan administrasi, program desa digital juga diarahkan untuk mendukung pengelolaan keuangan desa dan pengembangan ekonomi masyarakat. Pemerintah desa berupaya memperkenalkan teknologi digital sebagai sarana untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik serta memperluas peluang ekonomi masyarakat melalui pemanfaatan media sosial dan platform digital. Dengan demikian, desa digital tidak hanya dipahami sebagai penggunaan teknologi dalam administrasi pemerintahan, tetapi juga sebagai strategi pembangunan desa yang lebih adaptif terhadap perkembangan zaman.

b) Pemanfaatan Layanan Digital dalam Administrasi Kependudukan

Salah satu bentuk nyata implementasi desa digital yang dirasakan masyarakat Desa Sindangheula adalah layanan administrasi kependudukan. Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu informan, Hani (28 tahun), diketahui bahwa masyarakat telah memanfaatkan aplikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) untuk mengakses berbagai keperluan dokumen kependudukan secara elektronik. Melalui aplikasi tersebut, masyarakat dapat mengakses pelayanan Kartu Tanda Penduduk (KTP) digital, Kartu Keluarga (KK), akta kelahiran, serta dokumen administrasi lainnya.

Keberadaan layanan digital ini memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam memperoleh dan menyimpan dokumen penting. Dokumen yang sebelumnya harus disimpan dalam bentuk fisik kini dapat diakses melalui perangkat digital sehingga lebih praktis dan efisien. Digitalisasi administrasi kependudukan juga menunjukkan adanya perubahan pola pelayanan publik dari sistem konvensional menuju sistem yang lebih modern dan berbasis teknologi.

Meskipun demikian, pemanfaatan layanan digital belum sepenuhnya berjalan optimal. Informan mengungkapkan bahwa proses pembaruan data dalam sistem sering kali memerlukan waktu yang cukup lama. Pengalaman saat mengurus perubahan data keluarga menunjukkan bahwa dokumen yang dijanjikan selesai dalam waktu dua minggu baru dapat diakses setelah dalam jangka waktu satu sampai dua bulan. Kondisi tersebut menyebabkan masyarakat harus melakukan proses pengecekan berkala terhadap sistem untuk memastikan perkembangan pengajuan administrasi yang dilakukan.

Temuan ini menunjukkan bahwa meskipun teknologi digital telah diterapkan dalam pelayanan administrasi, efektivitas pelayanan masih dipengaruhi oleh proses birokrasi dan

mekanisme pengelolaan data yang berlangsung di balik sistem digital tersebut. Oleh karena itu, keberhasilan digitalisasi tidak hanya bergantung pada keberadaan aplikasi, tetapi juga pada kualitas pelayanan yang mampu diberikan kepada masyarakat.

c) Kesenjangan Digital dan Rendahnya Literasi Teknologi Masyarakat

Berdasarkan hasil wawancara dan obeservasi yang dilakukan sebelumnya menunjukkan bahwa salah satu tantangan utama dalam implementasi desa digital adalah masih adanya kesenjangan digital di tengah masyarakat. Kesenjangan tersebut terlihat dari perbedaan tingkat pemahaman dan kemampuan masyarakat dalam memanfaatkan teknologi digital yang tersedia. Informan mengaku hanya mengetahui penggunaan aplikasi IKD dan belum memahami berbagai layanan digital lainnya yang mungkin dapat dimanfaatkan. Pengetahuan mengenai aplikasi tersebut diperoleh bukan melalui sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah desa, melainkan ketika mengurus dokumen kependudukan. Hal ini menunjukkan bahwa penyebaran informasi mengenai layanan digital belum sepenuhnya menjangkau ke seluruh lapisan masyarakat.

Temuan tersebut sejalan dengan keterangan kepala desa yang menyebutkan bahwa rendahnya literasi digital masyarakat menjadi salah satu hambatan terbesar dalam pelaksanaan program desa digital. Menurutny, kelompok masyarakat usia lanjut masih mengalami kesulitan dalam memahami penggunaan teknologi digital. Meskipun akses terhadap perangkat dan internet sudah banyak tersedia dan dapat diakses kapanpun, tidak semua masyarakat memiliki kemampuan yang sama dalam memanfaatkan teknologi tersebut.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, pemerintah desa berupaya melakukan sosialisasi melalui berbagai kegiatan kemasyarakatan seperti pengajian, peringatan hari besar keagamaan, dan kegiatan sosial lainnya. Namun, proses adaptasi terhadap teknologi digital masih membutuhkan waktu karena perubahan perilaku dan kebiasaan masyarakat tidak dapat dilakukan secara instan.

Kondisi ini menunjukkan bahwa kesenjangan digital yang terjadi tidak hanya berkaitan dengan akses terhadap teknologi, tetapi juga menyangkut kemampuan memahami, menggunakan, serta infrastruktur digital dalam memperoleh manfaat dari teknologi tersebut. Oleh karena itu, peningkatan literasi digital menjadi faktor penting dalam mendukung keberhasilan implementasi Desa Digital.

d) Digitalisasi sebagai Upaya Pemberdayaan dan Pengembangan Ekonomi Masyarakat

Selain meningkatkan kualitas pelayanan publik, digitalisasi juga dimanfaatkan sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi masyarakat. Pemerintah Desa Sindangheula berupaya mengintegrasikan teknologi digital ke dalam kegiatan ekonomi masyarakat melalui promosi produk lokal menggunakan berbagai platform digital. Salah satu potensi ekonomi yang dikembangkan adalah usaha kreatif sapu lidi yang menjadi mata pencaharian sebagian masyarakat desa. Pemerintah desa membantu proses promosi dan publikasi produk melalui media sosial seperti Facebook, TikTok, dan YouTube. Selain itu, masyarakat juga didorong untuk memanfaatkan *marketplace* sebagai sarana pemasaran produk yang memiliki jangkauan pasar lebih luas.

Upaya tersebut dilakukan sebagai bentuk adaptasi terhadap perubahan pola konsumsi masyarakat yang semakin banyak memanfaatkan platform digital dalam melakukan transaksi ekonomi. Digitalisasi dipandang sebagai peluang untuk meningkatkan daya saing produk lokal sekaligus memperluas akses pasar bagi pelaku usaha desa. Namun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi digital dalam bidang ekonomi masih belum optimal. Sebagian masyarakat, khususnya kelompok usia dewasa dan lanjut usia, masih lebih terbiasa menggunakan metode pemasaran konvensional dibandingkan platform digital. Sementara itu, generasi muda yang memiliki kemampuan digital lebih baik sebagian besar bekerja di luar daerah sehingga keterlibatan mereka dalam pengembangan ekonomi digital desa masih terbatas. Meski demikian, pemerintah desa melihat generasi muda sebagai kelompok yang memiliki potensi besar dalam mendorong transformasi digital ekonomi desa. Oleh karena itu, berbagai program digitalisasi lebih banyak diarahkan kepada generasi muda agar mereka dapat menjadi penggerak inovasi dan perubahan di masyarakat.

e) Tantangan dan Prospek Pengembangan Desa Digital

Implementasi Desa Digital di Desa Sindang Heula menunjukkan bahwa transformasi digital telah memberikan manfaat yang cukup besar dalam meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan publik dan membuka peluang pengembangan ekonomi berbasis

teknologi. Namun demikian, masih terdapat berbagai tantangan yang perlu diatasi agar manfaat digitalisasi dapat dirasakan secara lebih merata.

Tantangan pertama berkaitan dengan kualitas infrastruktur digital, terutama stabilitas jaringan internet dan server yang masih sering mengalami kendala. Permasalahan teknis tersebut dapat menghambat akses masyarakat terhadap layanan digital dan memengaruhi efektivitas pelayanan yang diberikan. Tantangan kedua adalah rendahnya tingkat literasi digital masyarakat yang menyebabkan pemanfaatan layanan digital belum optimal. Tantangan ketiga berkaitan dengan kualitas pelayanan administrasi yang masih menghadapi keterlambatan dalam proses pembaruan data dan penyelesaian dokumen.

Selain itu, pemerintah desa juga menghadapi tantangan dalam memastikan keberlanjutan program Desa Digital. Kepala Desa mengungkapkan bahwa keberhasilan program tidak hanya ditentukan oleh keberadaan teknologi, tetapi juga oleh tingkat partisipasi masyarakat dalam menggunakan layanan yang telah disediakan. Program digital yang tidak dimanfaatkan secara maksimal berpotensi menjadi investasi yang kurang efektif bagi desa.

Meskipun demikian, prospek pengembangan Desa Digital di Desa Sindang Heula masih sangat terbuka. Dukungan pemerintah desa, ketersediaan teknologi, serta semakin meningkatnya penggunaan perangkat digital oleh masyarakat menjadi modal penting dalam mendorong keberhasilan transformasi digital di masa mendatang. Oleh karena itu, peningkatan literasi digital, penguatan infrastruktur teknologi, serta optimalisasi kualitas pelayanan menjadi langkah strategis yang perlu dilakukan untuk mewujudkan pembangunan desa yang lebih inklusif, adaptif, dan berkelanjutan.

D. Kesimpulan

Desa Digital di Desa Sindangheula, Kecamatan Pabuaran, Kabupaten Serang telah menunjukkan perkembangan yang cukup signifikan dalam modernisasi pelayanan publik berbasis digital. Keberhasilan utama program ini tercermin dari penerapan layanan administrasi kependudukan melalui aplikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD), yang memberikan kemudahan akses bagi masyarakat dalam mengurus berbagai kebutuhan dokumen administratif tanpa harus hadir secara fisik ke kantor desa. Di samping itu, pemanfaatan media sosial dan platform digital untuk promosi produk lokal menunjukkan bahwa Desa Digital tidak hanya berorientasi pada pelayanan administratif, melainkan juga pada pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Namun demikian, kepercayaan publik terhadap layanan digital desa masih menghadapi sejumlah hambatan yang perlu mendapatkan perhatian serius. Pertama, kesenjangan digital yang bersumber dari rendahnya literasi teknologi, khususnya di kalangan masyarakat usia lanjut, menjadi hambatan struktural yang tidak dapat diselesaikan hanya melalui penyediaan infrastruktur teknologi. Kedua, keterlambatan pembaruan data dan penyelesaian dokumen administrasi berpotensi menurunkan kepuasan dan kepercayaan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan. Ketiga, keterbatasan infrastruktur jaringan internet yang belum merata menjadi kendala teknis yang memengaruhi aksesibilitas layanan digital secara menyeluruh.

Untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut, diperlukan pendekatan yang komprehensif dan berkelanjutan. Pemerintah desa perlu terus meningkatkan program literasi digital melalui sosialisasi yang lebih intensif dan terstruktur, memperkuat kapasitas teknis pengelola layanan digital, serta berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan pusat dalam memperbaiki infrastruktur jaringan. Kepercayaan publik terhadap desa digital akan terbangun secara berkelanjutan apabila pemerintah desa mampu konsisten menghadirkan layanan yang informatif, responsif, transparan, dan mudah diakses oleh seluruh lapisan masyarakat. Dengan demikian, desa digital bukan sekadar konsep modernisasi, melainkan menjadi wujud nyata komitmen pemerintah desa dalam melayani masyarakat secara lebih baik di era transformasi digital.

E. Referensi

- Y. Setyowati, "DIGITALISASI DESA DALAM PERSPEKTIF GOVERNMENTALITY Studi Kasus Kalurahan Sambirejo , Kapanewon Prambanan , Kabupaten Sleman," vol. 2, no. 1, pp. 11–29, 2023. [1]
- T. A. Selian, R. A. Siregar, M. Syahrul, R. Nst, and A. Kurniawan, "Pengembangan Sistem Informasi Desa di Kabupaten Labuhanbatu : Studi Implementasi Teknologi dan Program Pengabdian Masyarakat untuk Mendukung Desa Digital," vol. 1, no. 2, pp. 61–68, 2025. [2]

- J. Ilmu and A. Publik, "PENGEMBANGAN DESA DIGITAL DI DESA LAWATAN KECAMATAN," vol. 5, pp. 209–214, 2023. [3]
- I. F. Ambarsari, N. Azizah, and Y. F. Al-faruq, "Digitalisasi Informasi dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Transformasi Desa Digital Melalui Pengembangan Website Desa Klatakan," vol. 4, no. 1, pp. 396–405, 2024. [4]
- J. Sosial and D. A. N. Humaniora, "Sosiera jurnal sosial, ekonomi, dan humaniora," vol. 4, pp. 36–43, 2025. [5]
- J. Inovasi, "Jurnal Inovasi dan Pengabdian Masyarakat Indonesia," vol. 3, no. 2, pp. 16–19, 2024. [6]
- B. Riset and N. Brin, "Kesenjangan Digital dan Solusi yang Diterapkan di Indonesia selama Pandemi COVID-19 The Digital Gap and Solutions Implemented in Indonesia," vol. 24, no. 2, pp. 187–200, 2022. [7]